

Efforts To Improve Clean Water Quality through The Community Self-Help Group Program(Case Study Of Ngemplak Village)

(Upaya Peningkatan Kualitas Air Bersih Melalui Program Kelompok Swadaya Masyarakat (Studi Kasus Kampung Ngemplak))

Meylawati Dora Kurniadewi*, Danang Purwanto, Riadi Syafutra Siregar

Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

*Corresponding author: Meylawatidorakd@student.uns.ac.id

Manuscript received: 28 Nov. 2023. Revision accepted: 20 Dec. 2023.

Abstract

This research aims to find out, describe, and analyze efforts to improve clean water quality through the Community Self-Help Group (KSM) program in Ngemplak Village, Jebres District. The method used is descriptive qualitative which focuses on the AGIL theory of Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency. To improve people's living standards, the government's role is an important effort in the Community-Based Drinking Water and Sanitation Program or PAMSIMAS. There were several obstacles to the PAMSIMAS program, in the end, the village community of Ngemplak, Jebres, Surakarta 2012 attempted to develop a supporting program in the form of a KSM (Community Self-Help Group) program called Warih Tomo which aims to improve community welfare by increasing the provision of clean water sources. which is suitable for consumption. The research results show that the development of the Community Self-Help Group program is in line with Talcott Parsons' functional structural theory where the community has various institutions that are connected so that the system can run well, so the efforts made by the people of Ngemplak Village can improve the quality of clean water by improving conditions in all existing aspects and in collaboration with other aspects of society. Apart from that, stakeholders also apply the AGIL concept well in making efforts to improve the quality of clean water in the village.

Keywords: AGIL, Clean Water, KSM, Pamsimas.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis terkait upaya peningkatan kualitas air bersih melalui program Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berada di Kampung Ngemplak, Kecamatan Jebres. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif yang berfokus pada teori AGIL Adaptasi (Adaptation), Goal Attainment (Pencapaian Tujuan), Integration (Integrasi), Latency (Pemeliharaan Pola). Guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, peran pemerintah menjadi upaya penting dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau PAMSIMAS. Adanya beberapa kendala dari program PAMSIMAS, pada akhirnya masyarakat desa Ngemplak, Jebres, Surakarta pada tahun 2012 berupaya untuk mengembangkan program pendukung berupa program KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang diberi nama Warih Tomo yang memiliki tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan penyediaan sumber air bersih yang layak konsumsi. Hasil penelitian didapat bahwa pengembangan program Kelompok Swadaya Masyarakat sejalan dengan teori fungsional struktural Talcott Parsons dimana masyarakat memiliki berbagai kelembagaan yang saling terhubung satu dengan yang lainnya agar sistem dapat berjalan dengan baik maka upaya yang dilakukan masyarakat Kampung Ngemplak tersebut dapat meningkatkan kualitas air bersih adalah dengan memperbaiki keadaan di segala aspek yang ada dan bekerjasama dengan aspek masyarakat lainnya. Selain itu para stakeholder juga menerapkan konsep AGIL dengan baik dalam melakukan upaya peningkatan kualitas air bersih di Desa tersebut.

Kata Kunci: AGIL, Air Bersih, KSM, Pamsimas

PENDAHULUAN

Ragam aktivitas masyarakat menjadi salah satu ancaman yang mengakibatkan

adanya penurunan kualitas air (Widiyanto et al., 2015). Penurunan kualitas air bersih akan berdampak pada tatanan kehidupan,

sebab air merupakan salah satu sumber kehidupan yang krusial dan mutlak yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup (Maharani, 2016). Pemenuhan aktivitas serta kebutuhan sehari-hari seperti kegiatan industri, domestik, serta kegiatan lainnya sebagian besar memerlukan air, sehingga kualitas dan kuantitasnya wajib dijaga (Dawud et al., 2016). Permasalahan mengenai rendahnya kualitas air sering terjadi di kota-kota padat penduduk, hal tersebut karena terbatasnya lahan, kepadatan penduduk yang mengakibatkan menumpuknya buangan rumah tangga yang beresiko menyebabkan pencemaran air (Prabowo & Kusuma Dewi, 2017).

Selaras dengan hal tersebut, dalam penelitian Ramadhani (2016) diperoleh fakta bahwa kualitas air bersih di Kota Solo rendah, fakta ini diperoleh melalui dokumen IKLH yang dimana dalam dokumen tersebut menjelaskan bahwa Kota Solo telah mengalami fase ketimpangan jumlah antara pasokan dan permintaan, terutama pada air permukaan. Dimana situasi tersebut menyebabkan penyediaan air bergantung pada daerah lain. Kualitas air yang menurun akan memperburuk krisis karena penyediaan air konsumsi semakin tidak terpenuhi oleh kapasitas sumber air permukaan saat ini. Sehingga perlu dilakukan tindakan pengurangan pencemaran oleh berbagai pihak. Apabila permasalahan ini tidak segera teratasi maka akan berdampak pada kesehatan masyarakat dan keseimbangan lingkungan (Lobo, 2022).

Melalui pendekatan berbasis masyarakat yang berorientasi pencegahan serta bekerja sama dengan stakeholder sebagai bentuk partisipasi keterlibatan masyarakat, dan pengorganisasian adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Upaya berbasis masyarakat adalah upaya untuk menyadarkan orang tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, mendorong perbaikan lingkungan yang rusak, dan menyediakan model baru untuk mengatasi masalah yang ada. Selain itu, agar semua orang dilindungi secara adil, upaya kesehatan masyarakat harus diterapkan pada semua kelompok masyarakat tanpa memandang

umur, ras, agama, jenis kelamin, atau jenis pengelompokan lainnya.

Guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, peran pemerintah menjadi upaya penting dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau PAMSIMAS. PAMSIMAS adalah program yang melibatkan banyak pihak yang bekerja di tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Berbagai lembaga pemerintah, termasuk Bappenas, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Keuangan, berkontribusi pada program dukungan Bank Dunia ini. karena prinsipnya berbasis masyarakat, keberhasilan program ini bergantung pada partisipasi masyarakat yang aktif.

Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi pengelolaan sumber daya alam yang menyatakan bahwa pendayagunaan sumber daya alam termasuk air di dalamnya harus ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengertian yang terkandung di dalam amanat konstitusi tersebut adalah bahwa negara bertanggungjawab terhadap ketersediaan dan pendistribusian potensi sumberdaya air bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan dengan demikian pemanfaatan potensi sumberdaya air harus direncanakan sedemikian rupa, sehingga memenuhi prinsip-prinsip kemanfaatan, keadilan, kemandirian, kelestarian dan keberlanjutan.

Serta untuk memenuhi kebijakan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah. Untuk mendukung kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program Pamsimas berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas.

Program Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui keterlibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dan lain-lain) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (demand responsive approach). Salah satu wujud dari adanya kebijakan pemerintah adalah dengan didirikannya Program PAMSIMAS yang dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan. Program ini menggunakan pendekatan berbasis kelembagaan dan berbasis masyarakat, dengan masyarakat menjadi pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan layanan melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.

Salah satu program yang dijalankan melalui pemberdayaan masyarakat menjadi jalan pintas yang bisa dipilih oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan permasalahan yang ada (Endah, 2020). Pemberdayaan masyarakat merupakan kemampuan untuk berproses yang melibatkan akal, ikhtiar dengan tujuan mengembangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat (Margayaningsih, 2018). Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menjadikan masyarakat mandiri, terlibat dengan perubahan-perubahan guna meningkatkan kesejahteraannya (Arfianto & Balahmar, 2014). Kurangnya perencanaan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat bisa mengakibatkan beberapa permasalahan seperti keterbelakangan, isolasi sosial, serta keterpurukan (Haris, 2014).

Upaya pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menjaga kualitas air minum dan air bersih salah satunya dengan membentuk program KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Urgensi terlaksananya program KSM sendiri salah satunya dipengaruhi oleh angka kepadatan penduduk, karena semakin padat kawasan penduduk, semakin berkurang pula kualitas air bersih. Pada kasus ini, proporsi penduduk terpadat di Kota Surakarta salah satunya ditempati oleh penduduk Kecamatan Jebres, dimana menurut data

dari Badan Pusat Statistik tahun 2022 mencapai angka 138.859 jiwa kecamatan terpadat di Kota Surakarta. Angka ini memiliki resiko pencemaran air tinggi dan kualitas air bersih dan air minum rendah.

Menurut data yang diperoleh pada penelitian (Ulfarina, 2018) bahwa mayoritas penduduk surakarta menggunakan air yang bersumber dari Cokrotulung Klaten, dengan penyebaran 23 sumur aktif. Kondisi ini belum menjadi solusi yang optimal dikarenakan kebutuhan masyarakat terkait penyediaan air bersih belum tercukupi. Serdasarkan hasil pra observasi yang sudah dilakukan hal ini selaras dengan fakta lapangan yang dialami oleh masyarakat di Desa Ngemplak ketika terjadi pemadaman bergilir, air yang bersumber dari PDAM aliran sumur yang sama menjadi keruh sehingga masyarakat kekurangan air bersih.

Semenjak permasalahan terkait penyediaan air bersih ini muncul, masyarakat desa setempat pada tahun 2012 berupaya untuk mendirikan program KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang diberi nama KSM "Warih Tomo" tujuannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan penyediaan sumber air bersih yang layak konsumsi dan mudah didapat oleh masyarakat sekitar serta dapat meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana prasarana penyediaan sumber air bersih yang layak dikonsumsi masyarakat.

Oleh karena itu, dengan adanya program tersebut Pemerintah Kota Surakarta mendukung penuh keberjalanan program tersebut, pada tahun yang sama pemerintah Kota Surakarta memberikan dukungan berupa dana pengembangan desa sebesar kurang lebih Rp 300.000.000 sebagai modal awal dalam membangun sarana masyarakat tersebut. Keanggotaan KSM di Desa Ngemplak, pada awalnya hanya terdiri dari 60 kepala keluarga, seiring berjalannya waktu dan perubahan kondisi banyak masyarakat yang bergabung. Saat ini menurut Ketua KSM Kampung Ngemplak, keanggotaan KSM

sudah mencapai 280 kepala keluarga yang ikut bergabung.

Keanggotaan yang kian besar mendasari pemerintah menyerahkan kepengurusan KSM sepenuhnya kepada masyarakat desa setempat dan tersebut yang mendasari keterbentukan pengurus KSM, disisi lain angka tersebut juga mendasari pengelolaan keuangan ditanggung kepada tiap kepala keluarga yang terlibat sebesar Rp 400.000 sebagai biaya awal pemasangan dan untuk biaya bulanan tergantung intensitas air yang digunakan.

Berdasarkan permasalahan atau kejadian yang terjadi di salah satu daerah yang berada di Kota Surakarta tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Upaya Peningkatan Kualitas Air Bersih Program KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) (Studi Kasus Desa Ngemplak, Kecamatan Jebres)".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di daerah Kampung Ngemplak, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dimana pada daerah tersebut melaksanakan program penyediaan air bersih yang dikelola

masyarakat melalui program KSM. Penelitian ini berfokus pada Upaya Peningkatan Kualitas Air Bersih Melalui Program Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kampung Ngemplak Kecamatan Jebres. Fokus pada penelitian ini menggunakan konsep AGIL yang dikembangkan oleh yang terdiri dari suatu system yaitu Adaptasi (Adaptation), Goal Attainment (Pencapaian Tujuan), Integration (Integrasi), Latency (Pemeliharaan Pola).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui sumber data berupa Interview (Wawancara) dengan informan, Observasi (Pengamatan), dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data. Terdapat tiga langkah dalam analisis data kualitatif, yaitu Data Reduction (Reduksi data), Data Display (penyajian data) dan Conclusion Drawing (menarik kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil dari proses pengumpulan data yang diperoleh oleh peneliti melalui tahapan wawancara dengan informan dengan karakteristik tertentu maka dapat dilihat melalui Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Informan

No	Pengelola dan Anggota KSM	Jumlah Informan
1.	Ketua Rw 29 Ngemplak, Mojosongo	1
2.	Ketua RT 03 Ngemplak, Mojosongo	1
3.	Ketua KSM " Warih Tomo"	1
4.	Anggota KSM	3

Aspek input penulis melakukan wawancara pada informan terkait seperti apa upaya peningkatan kualitas air bersih melalui program Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adapun dalam hal tersebut terkait dalam implementasi adanya program penyediaan air bersih melalui KSM. Dimana tujuan pemerintah setempat serta masyarakat Desa Ngemplak dapat merealisasikan program KSM yang sudah direncanakan maka

kegiatan tersebut terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya:

- a. Tahap Perencanaan
- b. Tahap Pelaksanaan
- c. Tahap pengawasan

Sebagaimana hal tersebut disampaikan oleh salah satu informan Bapak Sakimin selaku Ketua RW Desa Ngemplak dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Adapun dalam upaya merealisasikan program penyediaan air bersih tersebut bagi masyarakat Desa Ngemplak ini, Kami selaku pengurus Desa bersama masyarakat setempat turut berpartisipasi atau berkontribusi langsung dalam melaksanakan program ini, yakni mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasinya”

A. Tahap Perencanaan

Terdapat beberapa langkah-langkah dalam penyusunan Peraturan Desa yang diselenggarakan oleh Desa Ngemplak sebagai berikut:

1. Adanya Musyawarah Desa terkait penyusunan pembuatan sumur bor.
2. Adanya rapat pembentukan panitia pengelola pembuatan sumur bor
3. Adanya tindakan survey lapangan keadaan desa
4. Laporan pelaksanaan survey lapangan
5. Adanya rancangan pembuatan sumur bor
6. Adanya penetapan pembuatan sumur bor

B. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan suatu tahap pengimplementasian kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya, guna menjalankan program penyediaan air bersih di Desa Ngemplak ini pemerintah Desa setempat dan masyarakat telah menyetujui adanya hasil dari musyawarah dengan menggunakan dana Anggaran dan Belanja Desa tahun 2012.

Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Sakimin selaku Ketua RW setempat dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Sebelum merealisasikan program pemberdayaan masyarakat KSM ini kami selaku pengurus Desa setempat serta warga masyarakat desa sekitar telah melakukan musyawarah guna merealisasikan program KSM sebagai salah satu upaya program peningkatan air bersih ini sebagaimana hasil dari permusyawaratan tersebut membahas mengenai penentuan kapan, dimana,

pembuatan sumur bor ini dibuat serta bagaimana rancangan pendanaan yang akan digunakan dalam pembangunan tersebut”

Dengan adanya musyawarah yang sudah dilakukan oleh warga atau masyarakat setempat tersebut tentunya memperoleh hasil guna merealisasikan program KSM tersebut salah satunya dalam hal pendanaan guna membangun sumur bor tersebut memerlukan dana kurang lebih sekitar Rp 300.000.000 Rupiah (Tiga Ratus Juta Rupiah) Sebagai modal awal pembangunan sumur tersebut. Dalam demikian keberlangsungan program KSM dalam penyediaan air bersih tersebut dapat berkelanjutan dari sumber mata air sumur bor yang selanjutnya akan dialirkan melalui mata air perpipaan dari rumah ke rumah, masyarakat setempat berharap dengan adanya upaya peningkatan penyediaan air bersih melalui sumur bor ini dapat berjalan dengan optimal sehingga kebutuhan air bersih bagi masyarakat setempat dapat tercukupi.

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan dengan Bapak Ari Selaku Ketua RT setempat menjelaskan sebagai berikut :

“dengan adanya pembangunan sumur bor di Desa Ngemplak ini menjadi salah satu upaya yang dapat mengatasi keluhan masyarakat setempat dikarenakan dengan adanya pembangunan tersebut masyarakat sekarang sudah tidak kesulitan lagi mengakses air bersih sebab air bersih dari sumur langsung dialirkan melalui perpipaan ke rumah warga masing-masing. Dimana yang sebelumnya masyarakat sekitar terkendala dengan adanya pengairan air bersih melalui sarana pemerintah atau PDAM yang dikeluhkan masyarakat dengan adanya pemadaman air yang kemungkinan dapat berlangsung dalam beberapa hari ini dengan adanya pembangunan sumur bor yang telah dikelola oleh masyarakat sekitar tersebut ini dirasa cukup membantu serta cukup efektif dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat”

Hal tersebut juga selaras dengan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Widodo selaku ketua KSM tersebut :

“Dari adanya pembangunan sumur bor ini masyarakat setempat sudah tidak khawatir lagi akan kekurangan air bersih dikarenakan sumber mata air dari sumur bor tersebut sudah dapat dinikmati langsung oleh masyarakat sekitar. Selain itu kami selaku panitia juga memberikan fasilitas air bersih untuk keperluan disekitar pos kamplang, taman bunga, area sudut-sudut perkampungan, serta tempat ibadah yang ada disekitar sini. Namun masih terdapat kendala dalam pemerataan saluran perpipaan bagi masyarakat yang rumahnya dirasa terlalu jauh dari sumber sumur bor serta adanya kendala dari pendanaan biaya untuk perawatan dan penyaluran pipa sehingga kami sebagai pengurus mharus mencari solusi tersendiri dengan cara memberikan akses kran umum bagi masyarakat yang rumahnya belum bisa dijangkau secara langsung. Selain itu diluar kendala yang ada, hasil yang dicapai dari adanya pembangunan sumur bor ini masyarakat semakin banyak yang tertarik untuk turut serta bergabung dalam penggunaan mata air perpipaan inoi dari yang semula anggota KSM hanya sekitar 50 KK kini sekarang sudah mencapai sekitar 180KK yang tergabung dalam anggota penggunaan sumur bor ini”.

Namun berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Tugiman selaku masyarakat Desa Ngemplak memaparkan sebagai berikut;

“Saya sebagai masyarakat yang turut terlibat sbagai anggota pengguna sumur sbenarnya sudah cukup puas dalam pelayanan KSM ini tetapi di musim kemarai ini terdapat kendala yang dialami saat ini itu airnya sering mati mbak, dikarenakan musim kemarau ini resesapan airnya berkurang sehingga kami yang rumahnya di area dataran tinggi seperti ini ya jadi kekurangan air bersih karena airnya tidak mau naik ke atas”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Suparno masyarakat Desa Ngemplak menyampaikan sebagai berikut :

“hasil adanya sumur bor ini dapat dikatakan sudah cukup membantu masyarakat dalam penyediaan air bersih

tapi ya akhir-akhir ini kendalanya sering mati airnya mbak karena kemarau yang berkepanjangan jadi airnya kurang resapan sehingga banyak pompa air yang rusak kata beberapa panitianya dan biasanya sekali nyala airnya jadi keruh seperti warna kopi jadi harus dinyalakan dulu sampai airnya bersih. Kemungkinan hal tersebut yang menjadikan masyarakat risau akan kekurangan air bersih lagi apabila keadaan airnya masih seperti ini”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya pembangunan sumur bor ini masyarakat sudah cukup puas dengan adanya fasilitas tersebut namun program KSM tersebut juga dirasa belum memberikan hasil yang maksimal dan masih perlu adanya evaluasi dan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah Kampung Ngemplak untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

C. Tahap Evaluasi

Terkait tahap evaluasi ini ada beberapa pendapat hasil wawancara peneliti dengan informan, yakni :

Wawancara dengan Bapak Widodo, selaku Ketua KSM Warih Tomo dalam wawancaranya beliau mengatakan :

“untuk tahap evaluasi saat ini sepertinya dari pihak pemerintahan tidak memperhatikan atau bisa dikatakan sudah memasrahkan semua kepada panitia dikarenakan programnya sudah terlaksana, sedangkan kami dari pihak panitia sendiri juga sudah berupaya semaksimal mungkin salah satunya dengan memikirkan untuk membuat sumur bor lanjutan namun solusi tersebut kemungkinan juga belum dapat mengatasi secara keseluruhan pada saat ini dikarenakan adanya hambatan melalui biaya serta adaya pergantian kepengurusan baru”

Sementara itu wawancara dengan Bapak Tugiman selaku masyarakat Desa Ngemplak menyampaikan dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Pada tahap evaluasi ini kemungkinan sudah diperhatikan namun pelaksanaan solusinya kayaknya masih kurang dari apa yang sudah dilakukan oleh

pihak yang berkaitan, tetapi masyarakat Desa Ngemplak ini harusnya juga turut mencari solusi soalnya kebanyakan dari masyarakat sendiri juga sebagian besar bersikap acuh tak acuh sebab masyarakat menilai bahwa kasus ini merupakan tugas bagi pemerintah desa, padahal ini seharusnya kan tanggung jawab bersama”

Namun pihak pengelola sumur tersebut kemungkinan masih kurang dalam melaksanakan tahap ini, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di Desa Ngemplak, terlebih lagi pihak yang berkaitan mencoba melakukan evaluasi dalam pembangunan sumur bor air bersih lanjutan, sementara program yang sudah dilaksanakan dapat dikatakan belum berjalan maksimal. Seharusnya pihak terkait serta masyarakat setempat melakukan analisis mengapa air yang dialiri melalui sumur bor ini tidak konsisten dan terkadang warnanya keruh sehingga air yang mengalir tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat

Kendala KSM dalam penyediaan air bersih

Dalam menjalankan perannya KSM dalam penyediaan air bersih di Kampung Ngemplak tentunya terdapat beberapa factor penghambat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara factor-faktor penghambat KSM dalam penyediaan air bersih di Kampung Ngemplak sebagai berikut:

1. Tahap evaluasi yang dilakukan pihak terkait berjalan belum maksimal
2. Kurangnya pemahaman Pemerintah Desa mengenai siklus atau sistem sumur bor untuk menghasilkan air bersih
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan merawat sumur bor

Upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan air bersih.

Berdasarkan hasil penelitian terkait Upaya Peningkatan Kualitas Air Bersih Melalui Program (KSM) Kelompok Swadaya Masyarakat (Studi Kasus Desa Ngemplak, Kecamatan Jebres) dapat dikatakan sudah sesuai dengan

prosedurnya dan telah berjalan dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya secara keseluruhan belum bisa dikatakan efektif, dikarenakan masih banyak kekurangan dan masih belum memenuhi apa yang diinginkan masyarakat Desa Ngemplak. Dari penelitian tersebut maka perlu upaya dari pemerintah desa setempat untuk lebih mengoptimalkan atau melakukan evaluasi ulang sehingga program ini dapat berjalan secara optimal serta benar-benar dapat mengatasi masalah bagi masyarakat Desa Ngemplak dalam pelayanan penyediaan air bersih.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Ngemplak dalam meningkatkan kualitas pelayanan air bersih di Desa Ngemplak sebagaimana yang disampaikan Bapak Widodo selaku Ketua KSM dalam wawancaranya sebagai berikut:

“kami selaku pihak panitia akan berusaha untuk mencari solusi yang tepat guna mengatasi kekurangan yang ada khususnya dalam masalah pelayanan air bersih ini, namun seharusnya hal ini juga menjadi tanggung jawab bersama baik antara panitia maupun masyarakat setempat tetapi kami sebagai pihak panitia tentunya melakukan hal yang sewajarnya dengan membantu dalam memperbaiki permasalahan program ini, sebab inikan juga untuk kebutuhan masyarakat bersama. Nah maka dari itu, kami dari pihak panitia juga sangat amat berupaya semaksimal mungkin dalam memperbaiki program ini, diantaranya kami sudah melakukan berbagai cara seperti membuat sumur bor lanjutan, mengadakan evaluasi terbuka bersama masyarakat setempat, melakukan rapat kecil dari panitia untuk mengatasi kendala yang ada dan lain sebagainya yang dapat kami lakukan”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sakimin selaku Ketua RW 29 dalam wawancaranya dapat disimpulkan beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam meningkatkan kualitas pelayanan air bersih dari Desa Ngemplak sebagai berikut:

1. Menjalin kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa atau pihak panitia dengan anggota masyarakat lainnya.

Untuk menghasilkan program yang baik dan maksimal tentu harus dengan melakukan kerjasama yang baik juga dalam suatu organisasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sakimin selaku Ketua RW 29 dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Kami selaku panitia akan selalu berupaya untuk menjalin serta menjaga kerjasama yang baik antara panitia dengan masyarakat setempat dalam meningkatkan program SPAM ini dikarenakan hasilnya juga untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Jika dalam suatu organisasi tidak terjalin kerjasama yang baik mana mungkin suatu pekerjaan akan berjalan mulus”

2. Mengawasi atau Mengontrol berkala terhadap SPAM.

Tahapan setelah adanya pelaksanaan pembangunan tentunya adalah adanya pengawasan serta evaluasi. Seperti halnya pembangunan di Desa Ngemplak ini tidak terlepas dari adanya pengawasan dan evaluasi program pembangunan, Tim pengawas atau pihak panitia KSM dan semua unsur masyarakat yang terlibat tentunya mereka yang akan melakukan pengawasan terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan yang sudah dilakukan. Setelah dilakukan pengawasan maka perlu adanya laporan pertanggungjawaban yang nantinya akan dievaluasi bersama dengan semua pihak yang terkait baik pihak panitia maupun masyarakat setempat.

Dalam hal ini Ketua KSM Desa Ngemplak telah menyampaikan dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Kami atau khususnya saya selaku ketua panitia KSM Warih Tomo ini berupaya untuk selalu mengontrol proses penyediaan air bersih dengan cara memeriksa pipa, menjaga kebersihan area sumur bor, dan selalu menjaga kualitas air serta selalu mengontrol proses pengaliran air apakah berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu kami juga melakukan

pengawasan secara langsung kelapangan untuk melihat dan memeriksa keadaan SPAM, agar bisa memerikan tindakan lanjutan yang perlu dilakukan untuk langkah kedepannya, dan tentunya demi kebaikan bersama agar penyediaan air bersih melalui KSM ini akan semain hari semakin baik kedepannya”

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas dapat disimpulkan bahwa, pengawasan yang dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Ngemplak mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat Desa Ngemplak dan dapat dilihat juga dari hasil wawancara dengan Bapak Suparno selaku masyarakat pengguna fasilitas KSM dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Kami selaku masyarakat sekitar juga turut berpartisipasi dalam mengawasi dan mengurus keberlangsungan program SPAM ini, karena dengan pengawasan yang kami lakukan secara langsung itu sangat berdampak baik bagi kelangsungan SPAM itu sendiri, karena jika terus diawasi maka masyarakat sendiri juga dapat lebih waspada dan selalu menjaga SPAM yang mereka gunakan sehari-hari”

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat

Adanya keterlibatan masyarakat yang turut serta dalam pengelolaan air bersih merupakan salah satu cara untuk mempercepat suatu pekerjaan dan pengawasan serta proses evaluasipun lebih terjamin, sebab semakin banyak masyarakat yang turut berpartisipasi maka pastinya dapat meningkatkan fasilitas pelayanan air bersih yang berada di Desa Ngemplak

Serta dalam hal ini pihak panitia KSM yang terlibat sudah menyampaikan kepada masyarakat Desa Ngemplak Kecamatan Jebres untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan program ini melalui penyuluhan, rapat evaluasi pemeliharaan air bersih, pemeliharaan langsung perpipaan tiap rumah, membayar biaya pajak air secara rutin dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya dalam pembangunan pelayanan air bersih saja tetapi juga

termasuk dalam aspek semua hal yang menyangkut untuk perkembangan dan kemakmuran Desa Ngemplak itu sendiri

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Widodo selaku Ketua KSM dalam wawancaranya sebagai berikut:

“untuk mencapai hasil yang baik dalam menjalankan program ini kami selaku Panitia KSM selalu memberikan masukan- masukan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan bahkan dalam masalah pengawasan program ini, yang mana sebelumnya banyak masyarakat yang bersifat acuh tak acuh terhadap program ini, hal ini kami sampaikan kepada masyarakat baik melalui penyuluhan dan melakukan rapat evaluasi terbuka seperti yang sudah kami lakukan selama ini”

Setelah disampaikan oleh Ketua KSM Warih Tomo terkait partisipasi masyarakat alhamdulillah sekarang sudah banyak masyarakat yang turut berpartisipasi dalam program ini, hal tersebut dapat dilihat dari daftar masyarakat yang turut hadir dalam rapat evaluasi terbuka terkait program penyediaan air bersih SPAM yang diadakan setiap seulan sekali, yang biasanya hadir beberapa orang namun setelah disampaikan oleh Ketua KSM terkait partisipasi masyarakat kini masyarakat mulai menyadari bahkan banyak yang hadir jika ada rapat atau penyuluhan terkait program penyediaan air bersih ini

PEMBAHASAN

Hasil penelitian diatas terdapat beberapa strategi yang diterapkan Talcott Parsons yaitu terkait teori fungsionalisme structural. Dalam teori fungsionalisme structural Talcott Parsons yaitu sistem tindakan terdapat 4 skema yang dikenal dengan skema AGIL diantaranya adanadnya proses *adaptation* (adaptasi), *goal attainment* (pencapaian tujuan), *integration* (integrasi), *latency* (pemeliharaan pola). Pada keempat fungsi tersebut diterapkan oleh pihak panitia KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) guna meningkatkan kualitas air bersih yang berada di Desa Ngemplak.

1. Adaptation

Adaptation (adaptasi) adalah sistem yang diharuskan dapat mengatasi hal-hal yang mendesak yang berasal dari lingkungan luar dimana sistem harus menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan. Apabila dikaitkan dengan upaya meningkatkan penyediaan kualitas air bersih maka strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan pembuatan mata air perpipaan melalui sumur bor. Penggunaan mata air melalui sumur bor ini dapat membantu meningkatkan penyediaan air bersih bagi masyarakat setempat. Dengan adanya pembuatan program fasilitas peningkatan air bersih melalui Kegiatan Swadaya Masyarakat ini dapat mengatasi keluhan warga yang kekurangan air bersih. Hal ini dilakukan agar masyarakat setempat tidak lagi kekurangan air bersih yang layak konsumsi dan layak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebab Salah satu permasalahan yang ada di Kampung Ngemplak adalah kurangnya ketersediaan air bersih. Oleh karena itu, masyarakat sekitar berupaya untuk meningkatkan kondisi kehidupan kampung yang lebih layak dikarenakan masyarakat setempat pada saat itu belum merasakan adanya perubahan kehidupan secara maksimal yang hanya memanfaatkan fasilitas pemerintah yang masih terbatas. Hal tersebut tersebut terjadi karena masyarakat sekitar belum memiliki tujuan yang jelas dalam mengelola dan membangun kampung. Akibatnya banyak masyarakat sekitar yang menghiraukan tentang pola hidup sehat diantaranya seperti belum dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, pengelolaan sampah yang benar, dan belum bisa mengelola serta menjaga lingkungan kampung yang bersih dan sehat.

Namun, lambat laun masyarakat mulai berkembang dan menyadari pentingnya pola hidup sehat dan mulai berupaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan cara masyarakat berkoordinasi dengan pemerintahan setempat guna meningkatkan ketersediaan air bersih yang

memadai untuk kehidupan sehari-hari. Meski sudah terdapat fasilitas pemerintah terkait penyediaan air bersih melalui PDAM namun hal tersebut berjalan tidak maksimal di Kampung Ngemplak dikarenakan di daerah tersebut sering terjadi pemadaman bergilir dimana menyebabkan masyarakat kekurangan sumber air bersih dimana daerah tersebut merupakan daerah yang tandus.

Oleh sebab itu, jika permasalahan tersebut dibiarkan begitu saja maka masyarakat sekitar dapat kekurangan air bersih yang layak konsumsi serta memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya pada tahun 2012 beberapa masyarakat berinisiatif untuk bekerja sama dengan pemerintahan setempat untuk dengan cara mendirikan program pemberdayaan masyarakat dengan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang diberi nama KSM "Warih Tomo". Dengan adanya kegiatan koordinasi yang dilakukan tersebut menghasilkan jawaban atas persoalan social yang ada terkait dengan upaya peningkatan kualitas air bersih di Kampung Ngemplak dengan cara memberikan fasilitas baru berupa penyediaan sumur bor yang dialirkan melalui sumber air perpipaan dari rumah ke rumah masyarakat sekitar.

Dengan adanya pembentukan KSM ini dapat dikatakan dapat mengatasi keluhan masyarakat terkait ketersediaan air bersih dikarenakan masyarakat sekitar sudah mulai beradaptasi dengan penggunaan sarana mata air perpipaan yang sudah disediakan oleh pihak KSM. Hal tersebut dapat dilihat dalam proses adaptasinya dimana masyarakat sekitar beralih dari penggunaan PDAM yang disediakan oleh pihak pemerintah kini beberapa masyarakat sekitar turut bergabung dalam anggota penggunaan mata air sumur bor dikarenakan masyarakat tertarik oleh kepuasan yang dirasakan pelanggan sebelumnya sehingga kini anggota KSM sudah mencapai 180 KK dari yang awalnya hanya sekitar 50 KK.

Adanya sarana yang disediakan oleh KSM ini masyarakat juga merasa hal

sangat membantu dalam penyediaan air bersih yang dimana sebelumnya masyarakat kekurangan sumber air bersih karena adanya pemadaman bergilir oleh PDAM yang dimana pemadaman tersebut dapat berlangsung beberapa hari sehingga masyarakat harus menampung ketersediaan air bersih apabila kran air menyala untuk mengantisipasi adanya pemadaman yang mendadak namun terkadang air yang dialirkan juga belum tentu selalu bersih sebab terkadang airnya juga keruh seperti kopi dan sedikit kekuningan hal tersebut yang menyebabkan kekurangan sumber air bersih.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa informan maka dapat dikatakan bahwa pengurus KSM sudah dapat dikatakan dengan baik dapat menerapkan fungsi adaptasi kepada para pelanggan atau masyarakat sekitar dengan cara beradaptasi dalam peralihan penggunaan sumber mata air dari sumber air PDAM kini masyarakat beralih dengan penggunaan mata air sumur bor yang dialirkan melalui perpipaan dari rumah ke rumah warga atau masyarakat tersebut.

2. Goal Attainment

Goal attainment (pencapaian tujuan) dimana pada sistem ini memiliki keharusan untuk mencapai tujuan utama. Jika hal tersebut dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas penyediaan air bersih maka strategi yang dilakukan masyarakat sekitar adalah dengan cara mendirikan program Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dimana program tersebut didirikan sebagai salah satu upaya dalam program meningkatkan kualitas air bersih. Oleh karena itu pendirian KSM tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan air bersih yang cukup dan layak untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk membangun kepedulian masyarakat tentang pola hidup sehat, dimana masyarakat sekitar akan diajak bekerja sama dengan cara berkontribusi langsung dalam penggunaan sumber air perpipaan

tersebut sehingga dengan adanya kontribusi masyarakat yang turut serta dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan tersebut agar program penyediaan air bersih tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga persoalan terkait upaya peningkatan ketersediaan air bersih tersebut dapat terselesaikan.

Dengan adanya pendirian program Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tersebut selain diharapkan dapat mengatasi permasalahan terkait air bersih program tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan solidaritas masyarakat setempat dan dapat menjadikan masyarakat yang lebih produktif dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu baik pihak yang terlibat dalam pengelola KSM maupun masyarakat sekitar diharapkan dapat mengelola serta merawat dengan baik sarana yang sudah disediakan tersebut agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal dan optimal.

3. Integration

Integration (integrasi) dimana pada sistem ini memiliki keharusan dalam menjaga hubungan bagian-bagian dari komponen tersebut. Jika dikaitkan dengan upaya peningkatan kualitas air bersih yang berada di Desa Ngemplak adalah tahap integrasi ini dilakukan dengan dengan cara melakukan kerjasama antara stakeholder bekerja sama dengan Pemerintah setempat serta seluruh masyarakat Kampung Ngemplak. Tujuan kerjasama ini dilakukan guna melangsungkan pembentukan program Kelompok Swadaya Masyarakat yang mengelola program upaya peningkatan air bersih melalui sumber mata air perpipaan yang akan dilairkan melalui sumur bor.

Bukti kerja sama tersebut dapat dilihat dalam tahap proses mendirikan Sumur Bor dimana masyarakat melibatkan pemerintah sebagai penyandang dana utama pembangunan sumur bor dimana pada saat pendirian tersebut pemerintah memberikan modal awal sebesar 300 juta rupiah. Upaya yang dilakukan oleh pengelola serta masyarakat setempat

tersebut dirasa cukup menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat sekitar dalam upaya peningkatan penyediaan air bersih yang layak dan memadai untuk kehidupan sehari-hari. Dimana keberhasilan keberjalanan program tersebut dapat dilihat dari berkurangnya keluhan masyarakat setempat terkait keuangan penyediaan air bersih guna mencukupi kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat sudah tidak khawatir lagi akan adanya kekurangan air bersih yang layak konsumsi terutama dimusim kemarau yang berkepanjangan seperti sekarang ini. Selain itu program tersebut juga dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat di Kampung Ngemplak dengan kepercayaan penuh dalam penyediaan air bersih melalui program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Dalam paguyuban tersebut juga terdapat kepengurusan keanggotaan resmi yang sudah ditetapkan oleh masyarakat sekitar. Dan paguyuban ini juga selalu mengadakan pertemuan atau rapat rutin yang dilakukan setiap sebulan sekali dimana pada kegiatan tersebut panitia melngajak seluruh masyarakat yang terlibat untuk melakukan evaluasi program yang sudah berjalan tersebut guna menyelesaikan dan mengatasi permasalahan yang masih ada. Integrasi yang dilakukan oleh panitia tersebut juga selalu melibatkan masyarakat agar tergabung di dalam paguyuban dan bahkan menjadi bagian yang berperan aktif membantu pihak panitia yang terlibat.

Selain melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat dalam proses pendiriannya selain itu dalam proses keberlangsungan program tersebut dalam proses integrasi ini setiap elemen masyarakat juga harus bersatu dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas air bersih dan meningkatkan kinerja KSM tersebut dalam mencapai tujuan utama program tersebut agar dapat berjalan lebih optimal untuk kedepannya.

4. Latency

Latency (pemeliharaan pola) pada tahap ini sistem memiliki keharusan untuk menyediakan, memelihara, serta memperbaiki pola-pola yang ada. Seiring keberjalanan program ini pemeliharaan pola yang dilakukan dalam upaya mempertahankan program KSM yang bertujuan untuk meningkatkan kuliatas air bersig tersebut adalah dengan melakukan evaluasi terbuka secara rutin setiap bulannya dan melakukan pengecekan langsung secara berkala di di lingkungan sekitar sumur bor serta pengecekan aluran perpipaan, selain itu panitia juga mengevaluasi terkait peraturan mengenai pajak dan pemeliharaan yang lainnya.

Dengan adanya pembentukan panitia kepengurusan tentunya sangat membantu dalam hal ini sebab, dalam proses pemeliharaan ini tentunya memerlukan beberapa strategi serta perlunya seseorang yang mengatur tentang proses keberjalanan program ini tentunya hal tersebut memudahkan masyarakat dalam menjalankan dan memelihara program ini. Dikarenakan dengan melibatkan masyarakat setempat dalam rapat rutin evaluasi terbuka disetiap bulannya, panitia dapat mengetahui keluhan- keluhan atau permasalahan yang dirasakan masyarakat sepoerti halnya yang terjadi ketika musim kemarau kemarin masyarakat mengeluh bahwa di beberapa tempat air tidak mengalir serta terkadang airnya keruh dan tidak layak konsumsi.

Oleh sebab itu dengan adanya proses evaluasi terbuka tersebut segenap pihak yang terkait khususnya bagi panitia pengelola program tersebut dapat lebih cepat dalam menanggapi permasalahan yang ada dan panitia juga dapat mencari solusi yang tepat guna mengatasi permasalahan tersebut. Ssehingga dengan adanya pola pemeliharaan dengan program evaluasi terbuka ini dapat membantu masyarakat setempat dalam memelihara adanya program peningkatan air bersih melalui program KSM tersebut diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan apan yang diharapkan masyarakat sekitar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian diatas sejalan dengan teori fungsional structural Talcott Parsons dimana masyarakat memiliki berbagai kelembagaan yang saling terhubung satu dengan yang lainnya agar sistem dapat berjalan dengan baik maka upaya yang dilakukan masyarakat Kampung Ngemplak tersebut dapat meningkatkan kualitas air bersih adalah dengan memperbaiki keadaan di segala aspek yang ada dan bekerjasama dengan aspek masyarakat lainnya. Selain itu para *stakeholder* juga menerapkan konsep AGIL dengan baik dalam melakukan upaya peningkatan kualias air bersih di Desa tersebut.

Mulai dari tahap adaptasi, para pengelola atau segenap pihak yang terlibat dalam kepengurusan KSM dapat beradaptasi dengan keadaan yaitu dengan pembuatan mata air perpipaan melalui sumur bor. Dimana masyarakat yang sebelumnya menggunakan sumber air melalui PDAM yang disediakan oleh pemerintah namun sekarang masyarakat beralih menggunakan mata air perpipaan sumur bor yang telah disediakan oleh KSM yang dikelola oleh masyarakat setempat sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan air bersih.

Fungsi pencapaian tujuan atau goal attainment, dimana program tersebut didirikan sebagai salah satu upaya dalam program meningkatkan kualitas air bersih yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan air bersih yang cukup dan layak untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk membangun kepedulian masyarakat tentang pola hidup sehat, dimana masyarakat sekitar akan diajak bekerja sama dengan cara berkontribusi langsung dalam penggunaan sumber air perpipaan tersebut sehingga dengan adanya kontribusi masyarakat yang turut serta dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan tersebut agar program penyediaan air bersih tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga persoalan

terkait upaya peningkatan ketersediaan air bersih tersebut dapat terselesaikan.

Tahap *integrasi*, pihak *stakeholder* yang mengelola program KSM tersebut bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam mendirikan program Kelompok Swadaya Masyarakat tersebut harus dapat bersatu sebagai upaya dalam mengelola, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas air bersih serta dalam meningkatkan kinerja KSM tersebut agar dapat mencapai tujuan utama program tersebut serta dapat berjalan lebih optimal untuk kedepannya.

Tahap *latency* atau tahap pemeliharaan pola, para pihak pengelola program KSM menerapkan pola yang sama secara terus menerus dengan melakukan evaluasi rutin terbuka di setiap bulannya dengan melibatkan masyarakat sekitar agar keluhan masyarakat dapat cepat terselesaikan.

Saran

Perlu diadakan sosialisasi dari implementor guna menambah wawasan bagi masyarakat sekitar terkait pengelolaan air bersih dan sanitasi

Pihak pengelola KSM tentunya harus lebih responsive dalam menunjang keberjalanan program serta dapat lebih sigap dan tanggap dalam menjalankan program tersebut. Agar proses pembangunan sarana prasarana dalam penyediaan air bersih dapat berjalan lebih maksimal dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianto, A. E. W., & Balahmar, A. R. U. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 2(1), 53–66. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i1.408>
- Asminar, A. (2019). Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam Rangka Menyukseskan Pamsimas III di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 3(1), 35. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2019.3.1.35-46>
- Dawud, M., Namara, I., Chayati, N., & Taqwa, F. M. L. (2016). Analisis Sistem Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cisadane Kota Tangerang berbasis Masyarakat. *Seminar Nasional Sains dan Teknologi*, 6(November), 1–8.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Haris, A. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Media. *Jupiter*, 13(2), 50–62.
- Intansari, D. W. A., & Susanto, A. (2022). Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih dengan Metode Treatment di Desa Sidogede Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dalam Program Pamsimas III 2021. *Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi*, 4(02), 150–160. <https://doi.org/10.53863/kst.v4i02.584>
- Lasmita, R., Mulyadi, A., & Fauzi, M. (2020). Analisis Pengelolaan Air Program Pamsimas Sebagai Sumber Air Bersih Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 14(1), 66. <https://doi.org/10.31258/jil.14.1.p.66-79>.
- Arfianto, A. E. W., & Balahmar, A. R. U. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 2(1), 53–66. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i1.408>
- Asminar, A. (2019). Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam Rangka Menyukseskan Pamsimas III di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 3(1), 35. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2019.3.1.35-46>
- Dawud, M., Namara, I., Chayati, N., & Taqwa, F. M. L. (2016). Analisis Sistem Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cisadane Kota Tangerang

- berbasis Masyarakat. Seminar Nasional Sains dan Teknologi, 6(November), 1–8.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Haris, A. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Media. *Jupiter*, 13(2), 50–62.
- Intansari, D. W. A., & Susanto, A. (2022). Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih dengan Metode Treatment di Desa Sidogede Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dalam Program Pamsimas III 2021. *Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi*, 4(02), 150–160. <https://doi.org/10.53863/kst.v4i02.584>
- Lasmita, R., Mulyadi, A., & Fauzi, M. (2020). Analisis Pengelolaan Air Program Pamsimas Sebagai Sumber Air Bersih Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 14(1), 66. <https://doi.org/10.31258/jil.14.1.p.66-79>
- Lobo, A. C. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Masyarakat di Desa Poponcol Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(3), 1386–1394.
- Maharani, D. (2016). Pembatasan Hak Menguasai Negara Oleh Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. *Arena Hukum*, 9(1), 32–52. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.3>
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Marulis, T. S. P. & Y. M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. *Pekbis Jurnal*, 12(3), 248–259.
- Nadhir, M. (2021). Memberdayakan Orang Miskin melalui Kelompok Swadaya Masyarakat. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11),.
- Nengsi, S. (2018). Analisis Keberlangsungan Program Penyediaan Air Minum. 4(1).
- Prabowo, R., & Kusuma Dewi, N. (2017). Kandungan Nitrit Pada Air Sumur Gali di Kelurahan Meteseh, Kecamatan. Tembalang Kota Semarang. *Bioma : Jurnal Ilmiah Biologi*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.26877/bioma.v5i1.1490>
- Puspita, D. S., Saptuti, I., Kawuryan, S., Handayani, W., Bisnis, E., Kristen, U., Wacana, S., Kristen, U., & Wacana, S. (2023). Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS): Studi di Kabupaten Temanggung Evaluation of The Community-based Water Supply and Sanitation Program (PAMSIMAS): A Study in Temanggung Regency dan Daya Dukung Lingkungan. 7(1), 71–81.
- Putri, D. E. (2016). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) (Studi pada Desa Ketapanrame Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar. 4(2). <http://repository.ub.ac.id/118542/>
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In Antasari Press.
- Ramadhani, E., Anna, A. N., & Cholil, M. (2016). Analisis Pencemaran Kualitas Air Sungai Bengawan Solo Akibat Limbah Industri di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. *Publikasi Karya Ilmiah*, 19.
- Raya, F. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengelolaan Zakat di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Aghniya Stiesnu Bengkulu*, 4(2), 118–127.
- Sufriadi, D., & Zakaria. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN)*

- Indonesia, 2(2), 62–72.
<https://doi.org/10.35870/jpni.v2i2.34>
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. In Bandung Alfabeta (p. 143).
- Ulfarina, M. (2018). Efektivitas Sistem Penyediaan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kawasan Pemukiman Sekitar Universitas Sebelas Maret, Surakarta. In Universitas Sebelas Maret.
<https://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/handle/10603/7385>
- Widiyanto, A. F., Yuniarno, S., & Kuswanto, K. (2015). Polusi Air Tanah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 246.
- Yefni, Y., & Haris, M. (2019). Pemberdayaan Lingkungan melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (Pamsimas) Desa Padang Mutung Kampar. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 4(1), 13.
<https://doi.org/10.24014/jmm.v4i1.7612>
- Yin, S., & Kaynak, O. (2015). Big Data for Modern Industry: Challenges and Trends. *Proceedings of the IEEE*, 103(2), 143–146.
<https://doi.org/10.1109/JPROC.2015.2388958>.